



DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



Hubungi Kami

- 📍 Jln. Mulawarman No.14 Samarinda
- ☎ 0541 - 742492
- ☎ 0812 5552 5133



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda adalah dokumen kerja untuk lima tahun mendatang terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Renstra yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan penyusunan anggaran setiap tahun.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan renstra ini. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita.

Samarinda, 19 September 2025

Kepala,


HENDRA AH, SH
NIP. 19691019 199802 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA.....	6
A. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.....	6
B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
A. TUJUAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029	33
B. SASARAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029	33
C. STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029	34
D. ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029	36
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
A. PROGRAM.....	38
B. KEGIATAN	40
C. SUB KEGIATAN	44
D. SUB KEGIATAN PRIORITAS	66
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	68
BAB V. PENUTUP	70

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya renstra dijabarkan secara rinci sebagai rencana kinerja SKPD setiap tahun.

Renstra ini berfungsi sebagai panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dari RPJMD yang menjabarkan visi, misi dan program-program unggulan pemerintah daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (revisi dari Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000)
9. Peraturan Menteri PU no 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.16 tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
11. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (revisi dari Kepmeneg PU no 10/KPTS/2000)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. PERMEN PU no 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dan Penyelamatan Kota Samarinda;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam jangka menengah, memastikan bahwa kegiatan pembangunan selaras dengan visi dan misi.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama masa periode Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung pencapaian visi, misi dan program-program Pemerintah Kota Samarinda.
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum Penyusunan.
- C. Maksud Dan Tujuan.
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

- A. Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- B. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 2. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029.

- B. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029.
- C. Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
- D. Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- A. Program.
- B. Kegiatan.
- C. Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, terget dan pagu indikatif.
- D. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- E. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- F. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

A. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

a. Dasar Hukum Pembentukan

Sejak tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda.

b. Tugas dan Fungsi

1) Dinas

Dinas bertugas:

- a) melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b) menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c) menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d) menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e) melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f) melakukan investigasi kejadian kebakaran;

- g) menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h) menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i) melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j) melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m) menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n) melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran meliputi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
- c) pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran, meliputi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, sarana dan prasarana;

- d) pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- e) pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f) pelaksanaan administrasi Dinas;
- g) pembinaan dan pengendalian UPTD Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat

- a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - (2) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
 - (3) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
 - (4) pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- (5) pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- (6) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- (7) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, keputakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- (8) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- (9) pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- (10) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- (11) pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- (12) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (13) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- (14) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat/pelanggan;
- (15) pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- (16) pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- (17) pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- (18) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- (19) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- (20) t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bidang Pencegahan

- a) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan dibidangpembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan inspeksi, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - (2) pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - (3) pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - (4) pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) atau Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - (5) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- (6) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - (7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
- a) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - b) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, penyelamatan dan evakuasi.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai tugasnya;
 - (2) penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan command center;
 - (3) penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran; dan
 - (4) penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak dan terdampak kebakaran dan operasi darurat nonkebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia

- (5) pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (6) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- (7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Bidang Sarana Prasarana

- a) Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - (2) perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - (3) perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - (4) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - (5) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- (6) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- (7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b) Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- f) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- g) Subkoordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

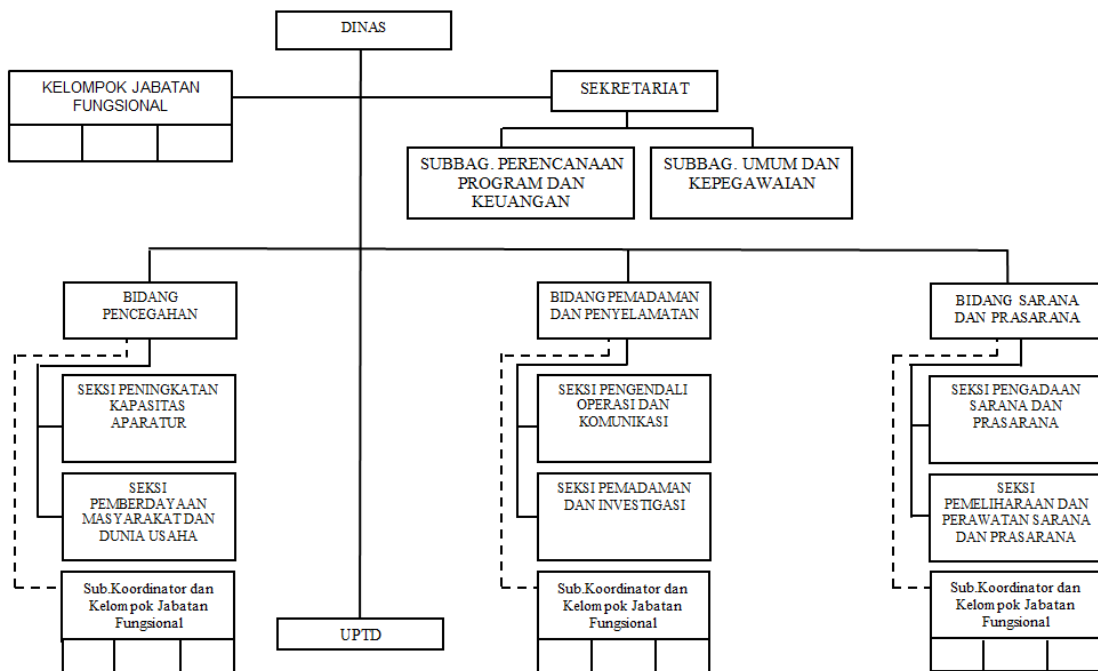
c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program Perencanaan dan Keuangan.
- C. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- F. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- G. UPTD Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 221 (Dua Ratus Duapuluh Satu) personil dengan rincian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Jabatan	PNS Golongan				PPPK	Honorer
		IV	III	II	I		
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris	1					
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1				
2.1.1	Staf		5	1		1	1
2.2	Kepala Sub Bagian Program Perencana dan Keuangan						
2.2.1	Staf		4				2
3	Kepala Bidang Pencegahan	1					
3.1	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur		1				
3.1.1	Staf		1			1	

No	Jabatan	PNS Golongan				PPPK	Honorer
		IV	III	II	I		
3.2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	1					
3.2.1	Staf			1		1	
3.3	Jabatan Fungsional		6				
4	Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan	1					
4.1	Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi	1					
4.1.1	Staf		4				1
4.2	Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi		1				
4.2.1	Staf		2			1	1
4.3	Jabatan Fungsional		1				
5	Kepala Bidang Sarana Prasarana	1					
5.1	Kepala Seksi Pengadaan Sarana Prasarana		1				
5.1.1	Staf		1				1
5.2	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana		1				
5.2.1	Staf		1				1
5.3	Jabatan Fungsional						
POS KOMANDO 1 Mulawarman							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		1	2			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)		1			1	4
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)		1	1		7	3
POS KOMANDO 2 Sempaja							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		1	2			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)		1	1		1	1
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			4		5	2
POS KOMANDO 3 Rawa Indah							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)					2	2
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			2		2	5

No	Jabatan	PNS Golongan				PPPK	Honorer
		IV	III	II	I		
POS KOMANDO 4 Sungai Kunjang							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			1		2	1
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			2	1	1	2
POS KOMANDO 5 Samarinda Seberang							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		1	2			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)					2	2
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)		1			2	5
POS KOMANDO 6 Palaran							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			4			1
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			1	1	2	1
POS KOMANDO 7 Kebun Raya							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		3				
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			3			1
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)		3	1			3
POS KOMANDO 8 Sambutan							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)						3
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)		2	1		1	4
POS KOMANDO 9 Gunung Lipan							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			2			2
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			2		2	1
POS KOMANDO 10 Loa Bakung							

No	Jabatan	PNS Golongan				PPPK	Honorer
		IV	III	II	I		
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		2	1			
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			2		2	1
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)		1	1		2	3
POS KOMANDO 11 Bukit Pinang							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		3				
2	Pengemudi (Operator Layanan Operasional)			1		2	2
3	Teknisi Mesin (Operator Layanan Operasional)			1			5
PUSAT KOMUNIKASI Mulawarman							
1	Komandan Regu (Pengelola Layanan Operasional)		1	1			1
2	Operator (Operator Layanan Operasional)		1	1			1
Jumlah		7	63	46	2	40	63
TOTAL SDM ASN dan NON ASN			118			40	63
					221		

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilengkapi dengan 1 (satu) unit bangunan kantor dan 11 (sebelas) unit bangunan posko serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada tabel tabel berikut :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
1	Kantor	Unit	1	1
2	Posko	Unit	12	11

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
3	Fire Truck	Unit	28	25
4	Mobil Tangga	Unit	2	1
5	Mobil URC	Unit	11	11
6	Mobil Rescue	Unit	3	1
7	Drone	Unit	2	1
8	Fire Boat	Unit	2	1
9	Pompa Pemadam Portabel	Unit	41	41
10	Tower Lamp	Unit	3	1
11	Generator Set	Unit	12	5
12	Radio Rig/ HT. Duduk	Unit	24	15
13	Handy Talky	Unit	210	116
14	Tower Repiter	Unit	3	2
15	Hidrant	Unit	100	77
16	Chainsaw	Unit	25	20
17	Chainsaw Beton	Unit	12	3
18	Gerinda Tuner	Unit	24	12
19	Jack Hammer Battery	Unit	12	1
20	Hooligan Tools	Unit	24	2
21	Combi Rescue Tools	Unit	12	1
22	Tandu Basket	Unit	12	3
23	Tripod Rescue	Unit	3	2
24	Life Jacket/Pelampung	Set	36	24
25	Fan Blower/Smoke Remover	Unit	12	12
26	Tenda Lipat	Buah	3	2
27	Tangga	Buah	24	11
28	Senter	Buah	36	11
29	Gancu	Buah	22	22
30	Hammer /Palu Godam	Buah	24	13
31	Carabiner Set	Set	24	13
32	Rubber Boat	Unit	3	2
33	Fiber Boat	Unit	5	5
34	Kandang Hewan	Unit	11	7
35	Selang 2,5	Roll	200	163

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
36	Selang 1,5	Roll	200	117
37	Nozel Jet 2,5	Unit	33	30
38	Nozel Jet 1,5	Unit	33	19
39	Nozel Foam	Unit	12	10
40	Nozel Spray	Unit	22	4
41	Nozel Monitor	Unit	11	5
42	Stick Ular	Unit	36	22
43	Stick Biawak	Unit	36	22
44	Kampak	Buah	24	14
45	Gancu	Buah	24	12
46	Kunci Tremo	Buah	12	4
47	Cutting	Buah	24	16
48	Breathing Aparatus (BA)	Buah	50	20
49	Turunan 2,5 ke 1,5	Buah	24	6
50	Segitiga Lalin	Buah	24	6
51	Linggis	Buah	24	13
52	Tahanan Ban / Ganjal	Buah	24	12
53	Ces Aki Krisbow	Buah	11	5
54	Baju Pemadam	Pasang	240	63
55	Baju Anti Tawon	Buah	36	23
56	Helm Pemadam	Buah	240	130
57	Masker Full Face	Buah	200	22
58	Filter Masker	Buah	200	27
59	Kaca Mata Goggle	Buah	36	18
60	Tabung Apar	Buah	150	57
61	Dongkrak	Buah	24	11
62	Tabung Oksigen	Buah	12	8
63	Tool Kit	Box	24	11
64	Sarung Tangan	Pasang	200	26
65	Lampu Emergency	Buah	24	11
66	Loker	Unit	12	11
67	Kotak P3K	Unit	12	11
68	Cabang 1,5	Buah	11	11

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
69	Cabang 2,5	Buah	11	11
70	Kunci Selang Hisap	Buah	11	5
71	Kunci Hidran / Main Valve	Buah	12	5
72	Nozel Gun 1,5	Buah	24	11
73	Nozel Gun 2,5	Buah	24	12
74	Fire Blangket	Buah	36	4
75	Sepatu Bot Harvick	Pasang	200	200
76	Bodi Harness	Buah	24	3
77	Tali Rafling	Buah	24	3
78	Nozel Variabel	Buah	12	1
79	Kombinasi 2,5 ke 1,5	Buah	24	6
80	Tarikan Wing	Buah	16	1
81	Kombinasi Hidran to inlet unit	Buah	11	2
82	Jumper Aki	Buah	12	11
83	Lampu Peringatan	Buah	12	11
84	Tali Tambang	Buah	24	3
85	Tandu Lipat	Buah	12	3
86	Mesin SCBA	Buah	5	2
87	Mesin 40 PK	Buah	3	1
88	Mesin 15 PK	Buah	3	1
89	Chainsaw Galah	Buah	11	1
90	Tandon	Buah	12	6
91	Mesin Rumput	Buah	11	3
Jumlah			3557	1721

3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

a. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang membandingkan antara target dan realisasi, sedangkan predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Predikat capaian kinerja

NILAI	CAPAIAN	PREDIKAT
A	> 100 %	Sangat Baik
B	80% - 100%	Baik
C	60% - 79,99%	Cukup Baik
D	50% - 59,99%	Cukup
E	< 50 %	Kurang

Sasaran Renstra periode 2021 - 2026 adalah:

Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia

dengan Indikator yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda yaitu: *“Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia”*.

Pencapaian kinerja dilaksanakan melalui *Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* dan ditunjang oleh *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja 2021-2024

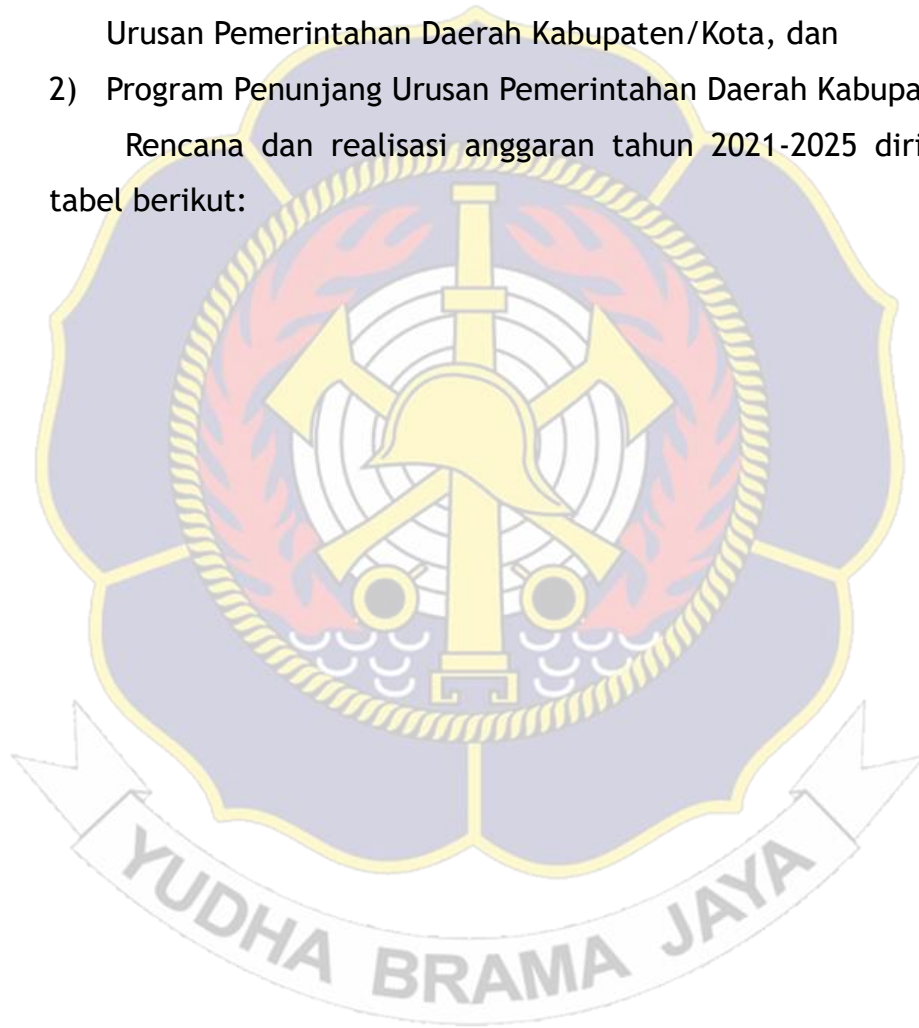
No	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	100	100	100	100	100	99,72	99,97	99,80	100	99,72	99,97	99,80
2	SPM	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	98.31	99.92	99.58

b. Rencana dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Renstra 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merencanakan anggaran ke dalam 2 (dua) Program yaitu:

- 1) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana dan realisasi anggaran tahun 2021-2025 dirinci dalam tabel berikut:



Tabel 2.5. Rencana dan realisasi anggaran tahun 2021-2025

No	Program/ kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.657.449.171	3.603.612.871	10.280.510.000	5.233.930.688	11.381.669.000	5.418.215.917	3.242.677.918	9.710.871.470	4.778.708.915						
1.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	4.582.971.271	2.114.961.500	8.994.550.000	3.760.172.050	10.560.882.000	4.500.157.018	1.886.463.306	8.753.828.486	3.575.876.209		98,19	89,20	97,32	95,10	0,00
1.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	190.152.400	152.224.995	120.000.000	174.160.000	90.552.000	176.803.400	138.078.146	83.326.700	134.814.268		92,98	90,71	69,44	77,41	0,00
1.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	41.999.000	81.842.000	92.700.000	85.447.638	52.000.000	41.379.000	72.942.099	52.809.989	60.655.638		98,52	89,13	56,97	70,99	0,00
1.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	131.011.000	654.201.476	567.950.000	700.329.500	461.000.000	111.738.000	572.501.018	407.816.983	598.759.800		85,29	87,51	71,81	85,50	0,00
1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	711.315.500	600.382.900	505.310.000	513.821.500	217.235.000	588.138.499	572.693.349	413.089.312	408.603.000		82,68	95,39	81,75	79,52	0,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.033.678.550	22.915.566.077	24.705.131.841	25.366.754.042	26.094.538.941	17.830.609.836	21.679.718.147	41.928.969.738	24.709.893.824		93,68	94,61	169,72	97,41	0,00
2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	66.143.000	29.213.000	110.000.000	200.000.000	180.989.000	31.165.100	29.142.000	88.258.100	174.419.696		47,12	99,76	80,23	87,21	0,00

No	Program/ kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.216.552.000	17.313.779.414	19.315.622.132	20.838.930.735	21.466.440.215	15.654.233.920	16.900.472.998	17.783.331.224	20.706.777.572		96,53	97,61	92,07	99,37	0,00
2.3	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	-	-	20.600.000	-	21.854.000	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	595.774.000	360.120.000	468.860.000	-	-	531.001.279	353.060.000		0,00	0,00	89,13	98,04	0,00
2.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.853.000	173.262.275	902.260.679	665.311.079	409.016.760	395.193.478	145.551.920	815.644.262	626.340.552		90,88	84,01	90,40	94,14	0,00
2.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.328.290.000	470.000.000	-	456.580.000	-	2.272.450.000	445.376.000	-		0,00	97,60	94,76	0,00	0,00
2.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.490.000	491.084.938	577.284.980	624.798.966	647.798.966	256.471.228	418.044.817	490.463.220	552.720.456		55,57	85,13	84,96	88,46	0,00
2.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.854.640.550	2.579.936.450	2.713.590.050	2.677.593.262	2.443.000.000	1.493.546.110	1.914.056.412	21.774.895.653	2.296.575.548		80,53	74,19	802,44	85,77	0,00

4. Kelompok Sasaran Layananan

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda diantara tupoksinya adalah :

- a) melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b) menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- c) menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pasal 6, kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Dari kedua peraturan diatas dapat disimpulkan bahwan kelompok sasaran layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah setiap warga Kota Samarinda yang menjadi korban kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Beberapa permasalahan utama yang menjadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengatasinya adalah :

- a. Masih tingginya jumlah kasus kebakaran.
- b. Jumlah kerugian harta/benda dan jiwa yang masih cukup besar

Dua permasalahan tersebut di atas tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Rekapitulasi kejadian kebakaran periode tahun 2021-2024

No	Tahun	Frekuensi	Bangunan Terbakar	Luas Area Terbakar	Jumlah korban				Prakiraan Kerugian (Rp)
					KK	Jiwa	Luka	MD	
1	2021	240	171	22.597	291	824	5	-	49.295.750.000
2	2022	227	254	43.043	342	1.369	5	8	79.505.500.000
3	2023	258	258	45.716	301	1.176	19	1	54.019.450.000
4	2024	266	250	25.702	353	1.122	8	6	60.912.170.000
Jumlah		991	933	137.058	1287	4.491	37	15	243.732.870.000
Rata-rata		247,75	233,25	34.265	321,75	1.123	9,25	3,75	60.933.217.500

Dua masalah pokok tersebut berasal dari masalah berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran. Yang berakar pada :
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini.
2. Upaya pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan yang masih kurang maksimal. Yang berakar pada :
 - a. Kurangnya sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan.
 - b. Kurangnya jumlah petugas telah mengikuti diklat pemadaman dan penyelamatan.

Masalah pokok, permasalahan dan akar masalah tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya jumlah kasus kebakaran	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini
2	Jumlah kerugian harta/benda dan jiwa yang masih cukup besar	Upaya pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan yang masih kurang maksimal	Kurangnya sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan Kurangnya jumlah petugas telah mengikuti diklat pemadaman dan penyelamatan

2. Isu Strategis

Dari data kebakaran beberapa tahun terakhir, penyebab terbesar terjadinya kebakaran adalah (diduga) korsleting listrik. Data ini didukung oleh survey kelayakan instalasi listrik di rumah-rumah warga yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang bekerja sama dengan lembaga berkompeten di bidang kelistrikan pada Tahun 2022 di 2 (dua) kelurahan yang termasuk daerah rawan kebakaran. Hasilnya adalah sebanyak 527 rumah dari 1000 rumah warga yang telah disurvei (52,7%) instalasi listriknya TIDAK LAYAK. Dengan kondisi seperti ini potensi terjadinya kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di dua wilayah tersebut sangat besar.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan diketahui ada kurang lebih 71 titik area rawan kebakaran yang kemudian di tahun 2023 dilakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan yang bekerjasama dengan tenaga ahli dari Universitas Mulawarman. Dari dokumen Laporan Akhir Kajian Risiko Kebakaran tersebut disimpulkan luas wilayah Risiko Kebakaran berdasarkan kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang dan Tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Luas (Ha) wilayah risiko kebakaran Kota Samarinda

No.	KELURAHAN	LUAS	KELAS RISIKO KEBAKARAN			
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kel. Sungai Pinang Dalam	511,60	-	89,28	249,12	175,68
2	Kel. Rawa Makmur	1.215,60	149,76	406,08	509,76	146,88
3	Kel. Air Putih	477,50	1,44	154,08	205,92	116,64
4	Kel. Sempaja Timur	587,50	-	276,48	198,72	113,76
5	Kel. Sempaja Selatan	487,90	-	123,84	259,20	105,12
6	Kel. Karang Asam Ulu	545,50	82,08	142,56	224,64	99,36
7	Kel. Loa Bakung	1.152,90	100,80	599,04	370,08	77,76
8	Kel. Bukuan	3.105,80	432,00	2.079,36	511,20	74,88
9	Kel. Harapan Baru	855,90	64,80	331,20	381,60	74,88
10	Kel. Sungai Keledang	394,00	125,28	80,64	123,84	60,48
11	Kel. Sidodadi	214,00	2,88	17,28	131,04	60,48
12	Kel. Bukit Pinang	3.665,90	132,48	3.193,92	256,32	57,60
13	Kel. Karang Asam Ilir	212,30	33,12	30,24	100,80	48,96
14	Kel. Air Hitam	460,90	8,64	146,88	257,76	48,96
15	Kel. Sempaja Utara	5.084,90	18,72	4.646,88	336,96	48,96
16	Kel. Gunung Kelua	285,90	4,32	43,20	194,40	47,52
17	Kel. Jawa	87,50	18,72	2,88	23,04	44,64
18	Kel. Gunung Lingai	558,50	5,76	345,60	158,40	44,64
19	Kel. Karang Anyar	160,50	1,44	2,88	112,32	43,20
20	Kel. Dadimulya	101,40	-	-	56,16	43,20
21	Kel. Mesjid	94,80	24,48	1,44	28,80	40,32
22	Kel. Simpang Tiga	529,10	41,76	234,72	214,56	37,44
23	Kel. Rapak Dalam	717,60	7,20	447,84	223,20	36,00
24	Kel. Pelita	67,10	-	1,44	30,24	34,56
25	Kel. Teluk Lerong Ilir	104,20	34,56	4,32	38,88	27,36
26	Kel. Tani Aman	507,80	4,32	351,36	113,76	25,92
27	Kel. Sungai Kapih	770,80	92,16	499,68	144,00	25,92
28	Kel. Sidomulyo	114,90	4,32	25,92	61,92	25,92
29	Kel. Sempaja Barat	179,50	-	64,80	86,40	24,48

No.	KELURAHAN	LUAS	KELAS RISIKO KEBAKARAN			
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
30	Kel. Lempake	3.453,40	59,04	3.035,52	342,72	24,48
31	Kel. Sambutan	2.670,70	27,36	2.255,04	365,76	23,04
32	Kel. Bandara	67,70	2,88	2,88	40,32	23,04
33	Kel. Mangkupalas	146,30	38,88	36,00	50,40	20,16
34	Kel. Teluk Lerong Ulu	129,00	30,24	12,96	63,36	18,72
35	Kel. Bugis	78,70	7,20	1,44	54,72	17,28
36	Kel. Temindung Permai	158,40	5,76	17,28	118,08	17,28
37	Kel. Tenun Samarinda	43,40	12,96	-	15,84	14,40
38	Kel. Mugirejo	1.876,70	53,28	1.488,96	328,32	14,40
39	Kel. Sengkotek	562,70	139,68	264,96	156,96	11,52
40	Kel. Selili	208,00	69,12	40,32	90,72	8,64
41	Kel. Sungai Dama	67,70	4,32	18,72	33,12	8,64
42	Kel. Sidodamai	105,90	1,44	47,52	51,84	7,20
43	Kel. Baqa	177,20	50,40	21,60	100,80	5,76
44	Kel. Makroman	2.581,80	59,04	2.301,12	192,96	5,76
45	Kel. Sindang Sari	904,10	7,20	705,60	177,12	2,88
46	Kel. Sungai Pinang Luar	74,70	1,44	-	69,12	2,88
47	Kel. Lok Bahu	3.395,10	148,32	2.776,32	430,56	2,88
48	Kel. Pasar Pagi	53,30	18,72	2,88	31,68	1,44
49	Kel. Bantuas	6.785,40	442,08	5.942,88	387,36	-
50	Kel. Handil Bakti	5.799,30	239,04	5.238,72	303,84	-
51	Kel. Loa Buah	1.439,20	203,04	1.039,68	158,40	-
52	Kel. Simpang Pasir	2.590,70	128,16	1.964,16	498,24	-
53	Kel. Pulau Atas	1.695,50	424,80	1.179,36	100,80	-
54	Kel. Gunung Panjang	313,00	38,88	152,64	123,84	-
55	Kel. Karang Mumus	59,60	21,60	1,44	34,56	-
56	Kel. Pelabuhan	96,20	20,16	4,32	70,56	-
57	Kel. Tanah Merah	2.602,90	60,48	2.295,36	240,48	-
58	Kel. Sungai Siring	7.632,30	144,00	7.202,88	272,16	-
59	Kel. Budaya Pampang	2.706,10	8,64	2.665,44	20,16	-
T o t a l		71.726,80	3.859,20	55.059,84	10.527,84	2.041,92

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa sebanyak 48 Kelurahan dari total 59 Kelurahan (81,4%) memiliki wilayah risiko tinggi kebakaran.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, potensi frekuensi terjadinya kebakaran di Kota Samarinda masih cukup tinggi. Untuk itu isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah “Peningkatan ketangguhan daerah rawan kebakaran dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui sosialisasi, edukasi, simulasi dan dukungan sarana prasarana.”

Tabel 2.9. Rumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Global	Nasional	Regional	
Kebakaran pemukiman dan lahan	1. Masih tingginya jumlah kasus kebakaran 2. Jumlah kerugian harta/benda dan jiwa yang masih cukup besar				1. Instalasi listrik yang tidak layak di wilayah rawan kebakaran 2. Luas wilayah risiko kebakaran	Peningkatan ketangguhan daerah rawan kebakaran dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui sosialisasi, edukasi, simulasi dan dukungan sarana prasarana

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029

Salah satu Sasaran RPJMD 2025-2029 Kota Samarinda adalah ***Mewujudkan Kota Yang Aman Dan Tangguh*** yang menjadi Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator *Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas*.

Tabel 3.1. Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra
SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU	Misi 4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Tujuan 3. Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas	Sasaran 1. Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh

B. SASARAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029

Di dalam Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah Indeks Komposit dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran. Sementara berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran diamanahi untuk melaksanakan pelayanan dasar yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan Sasaran ***Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*** dengan indikator *Persentase Pelayanan Pencegahan,*

Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tabel 3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda											
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh		Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas (Nilai)	64,2	65	65,5	66	66,5	67	67,5	
		Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	

C. STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai target sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini yaitu:
 - a. Pada Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan Pemeriksaan dan edukasi Instalasi Listrik di Kelurahan Tenun, Sidodadi, Teluk Lerong Ilir, Baqa, Sungai Pinang Dalam, Mangkupalas, Rawa Makmur, Air Putih, Jawa, Mesjid, Harapan Baru, Karang Asam, Ilir Sempaja Timur, Loa Bakung dan Bukit Pinang.
 - b. Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan Sosialisasi/ Edukasi langsung ke masyarakat di 10 Kecamatan dan juga melakukan sosialisasi melalui sosial media seperti Website, Facebook, Instagram dan lain-lain

Adapun tahapan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tahapan sosialisasi dan edukasi

No	Uraian Kegiatan	Tahapan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pemeriksaan dan edukasi Instalasi Listrik	Kelurahan Tenun, Sidodadi, dan Teluk Lerong Ilir	Kelurahan Baqa, Sungai Pinang Dalam dan Mangkupalas	Kelurahan Rawa Makmur, Air Putih dan Jawa	Kelurahan Mesjid, Harapan Baru dan Karang Asam Ilir	Kelurahan Sempaja Timur, Loa Bakung dan Bukit Pinang
2	Sosialisasi/ Edukasi langsung ke masyarakat	Kecamatan Palaran dan Sungai Kunjang	Kecamatan Samarinda Ilir dan Samarinda Utara	Kecamatan Sambutan dan Samarinda Ulu	Kecamatan Loa Janan Ilir dan Sungai Pinang	Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Seberang
3	Sosialisasi melalui sosial media	Whatsapp, Instagram, Facebook, Website	Whatsapp, Instagram, Facebook, Website	Whatsapp, Instagram, Facebook, Website	Whatsapp, Instagram, Facebook, Website	Whatsapp, Instagram, Facebook, Website

2. Pengadaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran wilayah rawan kebakaran yaitu pada Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana akan melakukan:
 - a. Pemasangan Hidran Mandiri di 12 Kelurahan wilayah risiko tinggi kebakaran.
 - b. Pembagian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di 44 Kelurahan wilayah risiko tinggi kebakaran.

Adapun tahapan pelaksanaannta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Tahapan pengadaan sarana prasarana

No	Uraian Kegiatan	Tahapan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pemasangan Hidran Mandiri	-	Kelurahan Baqa, Teluk Lerong Ilir dan Sidodadi	Kelurahan Pelita, Karang Asam Ilir dan Sidomulyo	Kelurahan Harapan Baru, Mangkupalas dan Loa Bakung	Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Selili dan Jawa
2	Pembagian APAR	-	Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Air Putih, Sempaja Selatan, Bukuan, Sungai Keledang, Sidodadi,	Kelurahan Rawa Makmur, Sempaja Timur, Karang Asam Ulu, Harapan Baru, Bukit Pinang, Karang Asam Ilir, Air Hitam,	Kelurahan Gunung Kelua, Jawa, Gunung Lingai, Karang Anyar, Dadimulya, Mesjid, Simpang Tiga, Rapak Dalam, Pelita dan Teluk Lerong Ilir	Kelurahan Tani Aman, Sungai Kapih, Sidomulyo, Sempaja Barat, Lempake, Sambutan, Bandara, Mangkupalas, Teluk Lerong Ulu, Bugis dan

No	Uraian Kegiatan	Tahapan				
		2025	2026	2027	2028	2029
			Air Hitam, Tenun, Mugirejo dan Sengkotek	Selili, Sungai Dama, Sidodamai, Baqa dan Makroman Sungai Pinang Luar		Temindung Permai

3. Melengkapi sarana prasarana, menambah jumlah dan meningkatkan keahlian aparatur dan meningkatkan sistem/teknologi informasi pelaporan/pengaduan.
4. Pendataan dan pembinaan RedKar dan meningkatkan frekuensi komunikasi/pertemuan/koordinasi dengan mitra lainnya.

D. ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD, arah kebijakan yang menjadi dasar adalah *Peningkatan ketangguhan wilayah rawan kebakaran terhadap bahaya kebakaran*. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan arah kebijakan Renstra sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Memberikan dukungan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah-wilayah rawan kebakaran.
- c. Peningkatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Mengoptimalkan peran kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Tab 3.5. Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan	Peningkatan ketangguhan wilayah rawan kebakaran	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
	berbahaya dan beracun kebakaran	terhadap bahaya kebakaran	penanggulangan kebakaran	
			Memberikan dukungan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah-wilayah rawan kebakaran	
			Peningkatan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Mengoptimalkan peran kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	



BAB IV.**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN****A. PROGRAM**

Berdasarkan Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **900.1.15.5-3406 Tahun 2024** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 1 Program Urusan yaitu PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN ditunjang dengan 1 Program Penunjang yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1. Program

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					33.605.523.283		34.312.055.000		35.076.367.700		35.777.895.100		36.502.507.650		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.195.523.283		27.175.297.899		27.175.297.899		27.175.297.899		27.375.297.899		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah		87	88	88,5	29.195.523.283	89	27.175.297.899	89,5	27.175.297.899	90	27.175.297.899	90,5	27.375.297.899	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
		88,4	89	89,5		90		90,5		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.410.000.000		7.136.757.101		7.901.069.801		8.602.597.201		9.127.209.751		
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		-	17,14	27,71	935.000.000	57,71	2.870.000.000	73,14	3.020.000.000	85,71	3.220.000.000	100	3.220.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		25.702	23.654	19.673	3.475.000.000	15.691	4.266.757.101	11.709	4.881.069.801	7.727	5.382.597.201	3.745	5.907.209.751	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
		0	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
		42	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
TOTAL KESELURUHAN					33.605.523.283		34.312.055.000		35.076.367.700		35.777.895.100		36.502.507.650		

B. KEGIATAN

Berdasarkan Program Urusan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN terdapat 5 Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda							
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh				Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas (Nilai)		
		Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Penurunan luas area yang terbakar (M2)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase kelaikan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Jumlah Dokumen Investigasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

C. SUB KEGIATAN

Dari 5 kegiatan tersebut terdapat 49 Sub Kegiatan. Tetapi hanya 20 Sub Kegiatan yang digunakan sesuai dengan kondisi daerah, perangkat daerah dan keuangan Kota Samarinda. Uraian sub kegiatan beserta pagu masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN				33.605.523.283		34.312.055.000		35.076.367.700		35.777.895.100		36.502.507.650		
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				29.195.523.283		27.175.297.899		27.175.297.899		27.175.297.899		27.375.297.899		
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	87	88,5	29.195.523.283	89	27.175.297.899	89,5	27.175.297.899	90	27.175.297.899	90,5	27.375.297.899	1.05.0.00.0.0 0.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	
	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Nilai)		88,4	89,5	90		90,5		91		91			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		
Perentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	250.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	14	13	13	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		14	13		(05)	(06)		13		13			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	69	65	65	65						65			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	7				7		7			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	75.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	13	75.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	69	65	0	65	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.785.254.317		21.475.297.899		21.475.297.899		21.475.297.899		21.475.297.899		
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	23.785.254.317	2	21.475.297.899	2	21.475.297.899	2	21.475.297.899	2	21.475.297.899		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130	156		156		156		156		156			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.959.617.668		18.500.000.000		18.500.000.000		18.500.000.000		18.500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
(01)	(02)	(03)	156	19.959.617.668	156	18.500.000.000	156	18.500.000.000	156	18.500.000.000	156	18.500.000.000		(14)	(15)	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130														
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.775.636.649		2.825.297.899		2.825.297.899		2.825.297.899		2.825.297.899		2.825.297.899			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	3.775.636.649	12	2.825.297.899	12	2.825.297.899	12	2.825.297.899	12	2.825.297.899				
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000				
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			441.100.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000			
Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0	8	441.100.000	9	520.000.000	9	520.000.000	9	520.000.000	9	520.000.000				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	235	230		230		230		230		230					
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			381.100.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	235	230	381.100.000	230	450.000.000	230	450.000.000	230	450.000.000	230	450.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(02)	(03)		10.000.000			10.000.000			10.000.000		10.000.000		(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000			
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000			60.000.000			60.000.000		60.000.000			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	8	50.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000			
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.000.000			597.000.000			597.000.000		597.000.000			
Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	302.000.000	2	597.000.000	2	597.000.000	2	597.000.000	2	597.000.000			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	8		8		8		8		8				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		10		10		10		10				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000				
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	50.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000				
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000				
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000				
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000				
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000				
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	8	100.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000				
				209.200.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000				
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	209.200.000	8	540.000.000	8	540.000.000	8	540.000.000	8	540.000.000				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		5		5		5		5					
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	2		2		2		2		2					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1					
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				169.200.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000				
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	2	169.200.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000				
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000				
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	25.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000			0		0		0		0			
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0			
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000			90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000				
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				650.798.966			801.000.000		801.000.000		801.000.000		801.000.000			
Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	650.798.966	12	801.000.000	12	801.000.000	12	801.000.000	12	801.000.000				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	2		2		2		2		2					
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000				
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				426.798.966			450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(01)	(02)	(03)	12	12	426.798.966	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		(15)			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000					
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	30.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000				
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					193.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000					
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	193.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000				
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.557.170.000		2.867.000.000		2.867.000.000		2.867.000.000		3.067.000.000					
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	3.557.170.000	12	2.867.000.000	12	2.867.000.000	12	2.867.000.000	12	2.867.000.000	12	3.067.000.000				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	20		40		40		40		40		40					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	34	33		33		33		33		33		33					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(01)	(02)	(03)													(14)	(15)		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	42	44		44		44		44		44		46					
					484.170.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000			
			34	33	484.170.000	33	470.000.000	33	470.000.000	33	470.000.000	33	470.000.000					
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					2.100.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.850.000.000				
			42	44	2.100.000.000	44	1.750.000.000	44	1.750.000.000	44	1.750.000.000	46	1.850.000.000					
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					123.000.000		123.000.000		123.000.000		123.000.000		123.000.000				
			145	20	123.000.000	40	123.000.000	40	123.000.000	40	123.000.000	40	123.000.000		123.000.000			
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					800.000.000		424.000.000		424.000.000		424.000.000		424.000.000				
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	12	12	800.000.000	12	424.000.000	12	424.000.000	12	424.000.000	12	424.000.000	12	424.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				4.410.000.000		7.136.757.101		7.901.069.801		8.602.597.201		9.127.209.751		
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran (%)	-	27,71	935.000.000	57,71	2.870.000.000	73,14	3.020.000.000	85,71	3.220.000.000	100	3.220.000.000	1.05.0.00.0.0 0.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.910.000.000		4.816.757.101		5.181.069.801		5.832.597.201		6.257.209.751		
Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	0		260.000.000	2	1.100.000.000	2	850.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0			1											
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	4	7		7		5		5		8					
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0			1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000				
		1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000				
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kabakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		4	4	30.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
Kabakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota														
1.05.04.2.01.0007 - Pombinaan Aparatur Pemadam Kabakaran				30.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kabakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kabakaran (Orang)		4	7	30.000.000	7	150.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	8	250.000.000		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kabakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0	0	300.000.000		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kabakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		0		0	1	300.000.000		0		0		0		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kabakaran dan analisis kabakaran				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakarannya	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakarannya (laporan)	0		0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakarannya				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	4	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01) Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	(02) Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	4	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	(14)	(15)	
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	4	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000			
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					475.000.000		1.520.000.000		1.870.000.000		1.870.000.000			
Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	1	1	475.000.000	1	1.520.000.000	1	1.870.000.000	1	1.870.000.000			
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	2	5	5		7		7		7				
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	500	500	500		500		500		500				
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	500	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000						
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	2	5	75.000.000	5	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000						
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	1.270.000.000	1	1.620.000.000	1	1.620.000.000	1	1.620.000.000						
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan				950.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		850.000.000						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01)	(02)	(03)														(15)
Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000				
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				150.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000				
Tertaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000				
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penurunan luas area yang terbakar (M2)	25.702	19.673	3.475.000.000	15.691	4.266.757.101	11.709	4.881.069.801	7.727	5.382.597.201	3.745	5.907.209.751				
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (%)	0	82		84		86		88		90					
	Persentase kelaikan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan (%)	42	65		70		75		80		85					
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.910.000.000		4.816.757.101		5.181.069.801		5.832.597.201		6.257.209.751				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	12	2.650.000.000	12	3.716.757.101	12	4.331.069.801	12	4.832.597.201	12	5.257.209.751	(14)	(15)
Jumlah Dokumen dan Laporan Iayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	402	21	22	24	40	40	655.636.000	655.636.000	655.636.000		655.636.000		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000		655.636.000		655.636.000		655.636.000		655.636.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12	12	12	12	655.636.000	655.636.000	655.636.000	12	655.636.000	12	655.636.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				1.000.000.000		1.563.460.000		1.563.460.000		1.563.460.000		1.563.460.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		12	12	1.000.000.000	12	1.563.460.000	12	1.563.460.000	12	1.563.460.000	12	1.563.460.000		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)		4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.000.000.000		1.447.661.101		2.061.973.801		2.563.501.201		2.988.113.751		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		402	21	1.000.000.000	22	1.447.661.101	24	2.061.973.801	40	2.563.501.201	40	2.988.113.751		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			
(01)	(02)	(03)	4	4	25.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		(15)
Jumlah Dokumen Investigasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000			
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000			
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				950.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		850.000.000			
Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	3	800.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	4	600.000.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	0	10		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	4		4		4		4		4				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				300.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)		1	4	300.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				500.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)		0	10	500.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000		
1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	3	0	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	4	300.000.000		

D. SUB KEGIATAN PRIORITAS

Diantara sub kegiatan diatas ada beberapa sub kegiatan prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4. Sub Kegiatan prioritas

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda				
1.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya memiliki 1 sasaran dengan 1 indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 Program Bidang Urusan dengan 4 indikator outcome yang 3 diantaranya ditetapkan sebagai 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki 1 indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda									
	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%		94	95	96	97	98	99	

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	positif	%	-	17,14	27,71	57,71	73,14	85,71	100	
3.	Penurunan luas area yang terbakar	negatif	M2	25.702	23.654	19.673	15.691	11.709	7.727	3.745	
4.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	positif	%	0	80	82	84	86	88	90	
5.	Persentase kelaikan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan	positif	%	42	60	65	70	75	80	85	



BAB V. PENUTUP

Penyusunan Renstra ini telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan juga telah mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2025-2029 untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dan mendukung visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Dokumen ini memuat rencana atau kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yang dijabarkan ke dalam 1 Program Urusan dan 1 Program penunjang sebagai:

- A. Pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan
- B. Pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Diharapkan dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renstra ini akan memberi dampak positif terhadap keamanan warga masyarakat Kota Samarinda terhadap ancaman bahaya kebakaran.

